



Judul : RUU Penanggulangan bencana, fungsi BNPB jadi kendali koordinasi
Tanggal : Minggu, 28 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Penanggulangan Bencana Fungsi BNPB Jadi Kendali Koordinasi

ANGGOTA Komisi VIII DPR M Husni menilai, sistem penanggulangan bencana nasional hingga kini belum berjalan optimal. Berbagai bantuan dari Pemerintah Pusat telah disalurkan ke wilayah terdampak bencana namun dirasa kurang terintegrasi.

Husni mengungkapkan, dari tiga provinsi mengalami bencana, Aceh mengalami dampak paling luas karena menjangkau lebih dari 18 kabupaten dan kota. Bahkan, ada juga wilayah yang sempat terisolasi seperti Gayo Lues dan Bener Meriah yang baru bisa terbuka beberapa hari lalu.

Dia bilang, bantuan dari Pemerintah Pusat sejatinya telah masuk ke daerah-daerah terdampak. Bantuan itu berasal dari berbagai institusi, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, hingga Kementerian Dalam Negeri.

Namun, peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam satu sistem komando belum terintegrasi dengan jelas. Kondisi itu diperparah dengan posisi BNPB yang masih berstatus sebagai badan, sehingga kewenangannya dalam mengoordinasikan lintas sektor dinilai belum maksimal.

"Walaupun TNI dan Polri ikut membantu, kalau integrasinya tidak nyambung, semuanya bergerak sendiri-sendiri. Padahal harus ada satu yang memutuskan," tegas Husni dalam kete-

rangannya, Kamis (25/12/2025).

Situasi itu, lanjut Husni, menunjukkan urgensi penyempurnaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Regulasi itu sudah perlu disesuaikan dengan dinamika kebencanaan saat ini yang semakin kompleks, berskala besar, dan berdampak luas.

Husni mengungkapkan adanya wacana di Komisi VIII DPR untuk memperkuat BNPB, termasuk kemungkinan peningkatan statusnya menjadi kementerian. "Kita ini daerah supermarket bencana dan tidak pernah putus. Belum selesai satu daerah, sudah muncul bencana di daerah lain," katanya.

Dia menekankan, dalam revisi UU itu nantinya BNPB harus ditempatkan sebagai pemimpin utama (leader) yang mampu mengintegrasikan seluruh unsur kebencanaan. Mulai dari TNI, Polri, kementerian teknis, hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Semua punya urusan kebencanaan, kalau tidak terintegrasi, akhirnya semua bertindak sendiri-sendiri, meskipun niatnya baik," ujarnya.

Husni juga menilai, kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan untuk menentukan berbagai keputusan strategis. Seperti, keputusan penetapan status tanggap darurat, waktu pembangunan hunian sementara (hunlara), hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. ■ **PYB**